



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN BAYONGBONG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 78 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 78 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 78 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 78);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BAYONGBONG TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 78 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 78) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 103

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 78
TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN BAYONGBONG
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah;
dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

- Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan

kegiatan perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bayongbong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bayongbong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program Renstra Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.207.066.885	65,99%	1.456.582.215
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.794.700	15,46	2.906.400

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.795.100	50,15	2.906.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.249.900	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.249.900	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.249.900	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.249.900	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.683.361.885	48,49	816.331.265
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	1.679.901.085	48,38	812.870.465
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.460.800	100	3.460.800
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.152.200	58,85	7.152.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.152.200	100	7.152.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.034.700	54,00	70.758.750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.067.600	100	4.067.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.739.000	50,00	18.869.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.275.200	100	4.275.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.229.700	50,00	5.114.850
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.763.200	50,00	4.881.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.260.000	50,00	12.630.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.560.000	50,00	18.780.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.140.000	100	2.140.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.893.100	100	283.103.100
Pengadaan Mebel	24.175.100	100	24.175.100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.718.000	100	59.467.000

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	100	199.461.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.263.300	56,63	17.706.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	50,00	3.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	66,67	5.680.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.743.300	53,91	9.026.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.567.000	69,05	32.155.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.067.000	67,66	6.135.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.500.000	69,39	26.020.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	167.080.300	18,26	30.521.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	128.080.300	27,06	30.521.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	128.080.300	27,06	30.521.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.000.000	52,99	20.666.700
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.000.000	52,99	20.666.700
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.299.800	77,68	28.199.800
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.299.800	100	6.299.800
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.299.800	100	6.299.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	73,00	21.900.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	73,00	21.900.000

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	113.914.100	35,81	39.278.100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	103.400.200	32,00	33.094.200
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53.400.200	63,28	33.094.200
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	0	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	10.513.900	58,81	6.183.900
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.513.900	58,81	6.183.900
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	215.000.000	30,51	65.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	215.000.000	30,51	65.600.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000	0	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	32,8	65.600.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	93,78	42.204.300
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	93,78	42.204.300
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	97,87	19.574.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	100	10.000.000

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	84,2	12.630.000
JUMLAH	2.784.361.085	52,31%	1.456.582.215

Sumber : Perubahan RENSTRA skpd/ KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 2.784.361.085,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.456.582.215,00 atau sebesar 52,31%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 28,05% untuk target kinerja dan 52,31% untuk target anggaran.

Tabel 2.2

Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/ kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (s.d Triwulan II Tahun 2023) yang dievaluasi	
			K	%	K	%	K	%	K	%
1	3	4	5				7			
	Urusan Kewilayahan		500	%	287,22	%	100	%	54,28	%
	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan		500	%	287,22	%	100	%	54,28	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	500	%	286,67	%	100	%	56,6	%

		Kecamatan								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	0	Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	Stel	51	Stel	22	Stel	22	Stel

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	6	Orang	2	Orang	0	Orang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	Item	30	Item	10	Item	6	Item
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	Jenis	123	Jenis	41	Jenis	24	Jenis
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	Item	48	Item	16	Item	10	Item
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	Eksemplar	216	Eksemplar	72	Eksemplar	33	Eksemplar
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	Orang	4.092	Orang	1364	Orang	581	Orang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	OH	1.800	OH	600	OH	250	OH
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	0	Item	0	Item	0	Item	1	Item
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	1	Item	1	Item	1	Item	1	Item
	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai kebutuhan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	Item	9	Item	3	Item	3	Item
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	bulan	36	bulan	12	bulan	6	bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	Unit	24	Unit	8	Unit	6	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	Unit	4	Unit	0	Unit	0	Unit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	%	290,53	%	100	%	34,33	%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi								

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	40	Kegiatan	24	Kegiatan	8	Kegiatan	3	Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Daerah di Kecamatan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	20	Laporan	12	Laporan	4	Laporan	2	Laporan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	%	300	%	100	%	77,69	%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	0	Laporan	4	Laporan	2	Laporan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	kali	12	kali	4	kali	2	kali
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	Kegiatan	2	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	kali	12	kali	12	kali	6	kali
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	%	262,38	%	100	%	37,62	%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	Kali	1	Kali	1	Kali	0	Kali

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	Kali	2	Kali	2	Kali	0	Kali
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	60	Kali	36	Kali	12	Kali	5	Kali
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	%	292,62	%	100	%	100	%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	90	Desa	24	Desa	8	Desa	0	Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa	18	Desa	18	Desa	3	Desa	3	Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.921.053.785	54,28%	1.456.582.215
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.794.700	15,46	2.906.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.795.100	50,15	2.906.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.249.900	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.249.900	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.249.900	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.249.900	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.648.160.342	49,52	816.331.265
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	1.644.699.542	49,42	812.870.465
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.460.800	100	3.460.800
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.152.200	58,85	7.152.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.152.200	100	7.152.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.034.700	54,00	70.758.750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.067.600	100	4.067.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.739.000	50,00	18.869.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.275.200	100	4.275.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.229.700	50,00	5.114.850
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.763.200	50,00	4.881.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.260.000	50,00	12.630.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	37.560.000	50,00	18.780.000

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
SKPD			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.140.000	100	2.140.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.893.100	100	283.103.100
Pengadaan Mebel	24.175.100	100	24.175.100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.718.000	100	59.467.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	100	199.461.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.263.300	56,63	17.706.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	50,00	3.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	66,67	5.680.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.743.300	53,91	9.026.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.567.000	69,05	32.155.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.067.000	67,66	6.135.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.500.000	69,39	26.020.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	149.109.700	45,37	51.187.700
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	112.809.700	27,06	30.521.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	112.809.700	27,06	30.521.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.300.000	56,93	20.666.700
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.300.000	56,93	20.666.700
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.299.800	77,69	28.199.800

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.299.800	100	6.299.800
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.299.800	100	6.299.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	73,00	21.900.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	73,00	21.900.000
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	109.678.100	35,81	39.278.100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.294.200	32,35	33.094.200
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52.294.200	63,28	33.094.200
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	0	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	7.383.900	83,75	6.183.900
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.383.900	83,75	6.183.900
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	174.356.000	37,62	65.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	174.356.000	37,62	65.600.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	15.000.000	0	0

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	159.356.000	41,17	65.600.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.204.300	100	42.204.300
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.204.300	100	42.204.300
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19.574.000	100	19.574.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	100	10.000.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.630.000	100	12.630.000
JUMLAH	2.683.513.242	54,28%	1.456.582.215

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 56,64%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 27,82% untuk target kinerja, dan 54,28% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
Renja Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD Kabupaten/Kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
														I		II												
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K
1	2					3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
	7					Urusan Kewilayahan		500	%	2.837.361.085	100	2.633.565.850	100	2.683.513.242	21,40	564.404.547	22,38	876.811.968	54,28	2.683.513.242	54,28	54,28	330,99	2.837.361.085	66,20	64,33	Kecamatan Bayongbong	
	7	1				Bidang Urusan Pemerintahan dan Bidang Kecamatan		500	%	2.837.361.085	100	2.633.565.850	100	2.683.513.242	21,40	564.404.547	22,38	876.811.968	54,28	2.683.513.242	54,28	54,28	330,99	2.837.361.085	66,20	64,33	Kecamatan Bayongbong	
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	%	2.268.046.785	100	2.168.234.650	100	2.171.865.342	22,33	444.011.947	24,90	759.785.068	56,64	2.171.865.342	47,33	56,64	333,90	2.268.046.785	66,78	63,54	Kecamatan Bayongbong	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Bulan	18.794.700	12	16.188.400	12	18.794.700	3	2.906.400	2			18.794.700			41	18.794.700	68,33	72,62	Kecamatan Bayongbong	
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	5.795.100	10	16.188.400	1	5.795.100	-	2.906.400	1		50,15	2.906.400			4	5.795.100	80,00	89,74	Kecamatan Bayongbong	
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	3.249.900	0	0	1	3.249.900	-	-	-		-	0			-	3.249.900	-	-	Kecamatan Bayongbong	

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	3.249.900	0	0	1	-	-	-	-	0	-	-	-	3.249.900	-	-	Kecamatan Bayongbong		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	3.249.900	0	0	1	-	-	-	-	0	-	-	-	3.249.900	-	-	Kecamatan Bayongbong		
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	3.249.900	0	0	1	-	-	-	-	0	-	-	-	3.249.900	-	-	Kecamatan Bayongbong		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	1.683.361.885	100	1.861.090.850	12	1.648.160.342	3	1.648.160.342	2	520.212.893		816.331.265	41,67	40,10	41	1.683.361.885	68,33	66,63	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	1.679.901.085	12	1.854.105.850	12	1.644.699.542	3	1.644.699.542	2	516.752.893	49,42	812.870.465	41,67	40,15	41	1.679.901.085	68,33	66,66	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Laporan	3.460.800	12	6.985.000	1	3.460.800	-	3.460.800	-	3.460.000	100	3.460.800	-	-	3	3.460.800	60,00	53,60	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	12.152.200	100	6.502.000	12	12.152.200	3	12.152.200	2			7.152.200	41,67	34,98	41	12.152.200	68,33	48,90	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Stel	7.152.200	20	6.502.000	17	7.152.200	17	7.152.200	-		100	7.152.200	100,00	100,00	68	7.152.200	80,00	78,16	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	5.000.000			3	5.000.000	-	5.000.000	-			0	-	-	6	5.000.000	50,00	26,92	Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan	132.009.700	100	158.865.000	12	131.034.700	38.304.375	30.314.575			41,67	38,47	41	132.009.700	68,33	63,61	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	Item	4.067.600	6	5.861.700	10	4.067.600	4.067.600		100	4.067.600	50,00	33,33	35	4.067.600	70,00	70,18	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	Jenis	37.739.000	52	47.675.300	41	37.739.000	9.434.750	9.434.750	50	18.869.500	58,54	41,14	147	37.739.000	71,71	61,42	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	Item	4.275.200	6	6.227.500	16	4.275.200	4.275.200		100	4.275.200	62,50	100,00	58	4.275.200	72,50	30,19	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	Bulan	11.204.700	5	19.763.700	12	10.229.700	2.381.025	2.733.825	50	5.114.850	41,67	42,42	41	11.204.700	68,33	56,01	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	Eksempla	9.763.200	156	10.576.800	72	9.763.200	2.440.800	2.441.000	50	4.881.600	45,83	41,67	249	9.763.200	69,17	75,90	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	60	Bulan	25.260.000	12	24.000.000	1364	25.260.000	6.315.000	6.315.000	50	12.630.000	42,60	32,72	4.673	25.260.000	68,52	62,56	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60	Bulan	37.560.000	12	44.760.000	600	37.560.000	9.390.000	9.390.000	50	18.780.000	41,67	35,37	2.050	37.560.000	68,33	34,72	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	2.140.000		0	1	2.140.000	2.140.000		100	2.140.000	-	21,19	-	2.140.000	-	9,64	Kecamatan Bayongbong	

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	381.398.000	100	73.834.800	12	283.893.100	67.393.000	191.535.000	41,67	72,89	41	381.398.000	68,33	61,74	Kecamatan Bayongbong			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	Item	46.680.000			0	24.175.100	-	-	100	24.175.100	-	-	6	46.680.000	60,00	45,60	Kecamatan Bayongbong	
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	9	Item	59.718.000	8	73.834.800	3	59.718.000	-	-	100	59.467.000	-	-	3	59.718.000	33,33	49,99	Kecamatan Bayongbong	
	7	01	01	2.07	09	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	Unit	275.000.000			0	200.000.000	-	-	100	199.461.000	-	-	2	275.000.000	100,00	61,30	Kecamatan Bayongbong	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	31.263.300	100	31.962.400	12	31.263.300	9.344.000	8.362.000	41,67	32,25	41	31.263.300	68,33	56,97	Kecamatan Bayongbong			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	Bulan	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	1.500.000	1.500.000	50	3.000.000	41,67	17,28	41	6.000.000	68,33	45,77	Kecamatan Bayongbong	
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	60	Bulan	8.520.000	12	5.680.000	3	8.520.000	2.840.000	2.840.000	66,67	50,00	11	8.520.000	73,33	59,79	Kecamatan Bayongbong			

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	bulan	16.743.300	12	20.282.400	12	16.743.300	5.004.000	4.022.000	53,91	9.026.000	41,67	44,19	41	16.743.300	68,33	63,37	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	9.067.000	100	19.791.200	12	46.567.000	22.794.400	9.360.600			41,67	29,15	41	9.067.000	68,33	37,97	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	Unit	9.067.000	8	19.791.200	8	9.067.000	3.349.400	2.785.600	67,66	6.135.000	50,00	29,15	28	9.067.000	70,00	69,37	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	Unit	0	0	0	0	37.500.000	19.445.000	6.575.000	69,39	26.020.000	-	-	-	0	40,00	17,03	Kecamatan Bayongbong
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	%	191.100.800	100	117.685.500	100	149.109.700	27.406.700	23.781.000	34,33	51.187.700	20,85	20,85	311,38	191.100.800	62,28	59,62	Kecamatan Bayongbong
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Bulan	152.100.800	12	78.478.800	12	112.809.700	13.990.000	16.531.000	27,06	30.521.000	41,67	17,12	41	152.100.800	68,33	55,57	Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Pengembangan	40	Kegiatan	152.100.800	12	78.478.800	112.809.700	13.990.000	16.531.000	27,06	30.521.000	37,50	17,12	27	152.100.800	67,50	55,57	Kecamatan Bayongbong
						Kesejahteraan Masyarakat																	
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	Bulan	39.000.000	12	39.206.700	36.300.000	13.416.700	7.250.000	56,93	20.666.700	41,67	37,21	41	39.000.000	68,33	191,67	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	20	Laporan	39.000.000	12		36.300.000	13.416.700	7.250.000	56,93	20.666.700	50,00	37,21	14	39.000.000	70,00	191,67	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2.02		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	12	Laporan		12	39.206.700												

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	%	9.299.600	100	6.300.000	100	36.299.800		10.950.000	77,69	28.199.800	44,68	44,68	344,68	9.299.600	68,94	73,76	Kecamatan Bayongbong	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	60	Bulan	6.299.800	12	6.300.000	12	6.299.800			100	6.299.800	41,67	50,88	41	6.299.800	68,33	50,26	Kecamatan Bayongbong	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	18	Desa	6.299.800	18 Desa	6.300.000	1				100	6.299.800	100,00	100,00	4	6.299.800	80,00	90,19	Kecamatan Bayongbong	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	Bulan	2.999.800			12	30.000.000		10.950.000	75	21.900.000	41,67	40,34	5	2.999.800	20,83	26,00	Kecamatan Bayongbong	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	2.999.800	0	30.000.000	1	30.000.000	-	10.950.000	75	21.900.000	100,00	40,34	1	2.999.800	50,00	26,00	Kecamatan Bayongbong	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	%	63.913.900	100	57.169.500	100	109.678.100		29.678.100	35,81	39.278.100	27,11	27,11	327,01	63.913.900	65,40	62,38	Kecamatan Bayongbong	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	Bulan	53.400.000	12	47.355.600	12	102.294.200		23.494.200	32,35	33.094.200	41,67	25,80	41	53.400.000	68,33	65,71	Kecamatan Bayongbong	

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	kali	53.400.000	12	47.355.600	4	52.294.200	23.494.200	63,28	33.094.200	50,00	35,74	14	53.400.000	70,00	80,17	Kecamatan Bayongbong	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	Kegiatan	0			1	50.000.000			0				0	60,00	32,21	Kecamatan Bayongbong	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	10.513.900	100	9.813.900	1	7.383.900	6.183.900	83,75	6.183.900	100,00	52,40	2	10.513.900	66,67	29,19	Kecamatan Bayongbong	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	kali	10.513.900	12	9.813.900	12	7.383.900	6.183.900	83,75	6.183.900	41,67	52,40	17	10.513.900	47,22	29,19	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	%	225.000.000	100	225.162.000	100	174.356.000	39.360.000	37,62	65.600.000	30,68	30,68	321,68	225.000.000	64,34	37,85	Kecamatan Bayongbong	

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100		225.000.000	100	225.162.000	12	174.356.000		26.240.000	39.360.000	37,62	65.600.000	41,67	30,68	41	225.000.000	68,33	37,85	Kecamatan Bayongbong
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	Kali	25.000.000	2	25.162.000	1	15.000.000				0	25.000.000			1	25.000.000	33,33	26,24	Kecamatan Bayongbong
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi / bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional																			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	60	Kali	200.000.000	12	200.000.000	12	159.356.000		26.240.000	39.360.000	41,17	65.600.000	41,67	37,98	41	200.000.000	68,33	45,55	Kecamatan Bayongbong
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desakerja Baik	500	%	80.000.000		59.014.200	100	42.204.300		28.946.100	19.257.800	100	42.209.900	74,80	74,80	367,42	80.000.000	73,48	51,22	Kecamatan Bayongbong

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	Bulan	80.000.000	12	59.014.200	12	42.204.300			13.257.800	100	42.209.900	41,67	74,80	41	80.000.000	68,33	51,22	Kecamatan Bayongbong		
7	1	6	2.01	01	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa	12	Bulan		12	30.078.900																
7	1	6	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	Kali				4	19.754.300			13.257.800	100	19.574.300	50,00	56,47	14		70,00	114,92	Kecamatan Bayongbong		
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	50.000.000																		
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	40	Desa	15.000.000	18	12.612.300	8	10.000.000					100	10.000.000	-	-	24	15.000.000	60,00	34,84	Kecamatan Bayongbong	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	21	Dokumen	15.000.000	20	16.323.000	1	12.630.000					100	12.629.600	100,00	100,00	2	15.000.000	66,67	30,67	Kecamatan Bayongbong	

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :

1. Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 6) adalah 50,00%.
2. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Rendah Adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu 27,06%
3. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Tinggi Adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu 100%
4. Faktor-faktor penyebab rendahnya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan adanya program dan kegiatan tersebut masih dilaksanakan sampai dengan triwulan III dan IV.
5. Faktor-faktor penyebab tingginya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
6. Implikasi yang timbul terhadap program yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah, perlu adanya percepatan pencairan anggaran untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Bayongbong Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bayongbong Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bayongbong

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
			Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD dan Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	6	7	8	9	10	11				
7	Kewilayahan											
7	Kecamatan		2.434.937.734	2.335.729.392	95,93%	2.683.513.242	1.456.582.215	54,28				
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota											
7	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perngkat Daerah											
7	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	16.188.400	16.188.400	100	5.795.100	2.906.400	56,64
7	01	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0	3.249.900	0	0
7	01	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	0	3.249.900	0	0
7	01	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	0	3.249.900	0	0
7	01	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	0	3.249.900	0	0
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
7	01	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1.655.477.734	1.556.773.592	94,04	1.644.699.542	812.870.465	49,42

7	01	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Tahun SKPD	6.985.000	6.985.000	100	3.460.800	3.460.800	100
7	01	01	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7	01	01	01	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	6.502.000	6.502.000	100	7.152.200	7.152.200	100
7	01	01	01	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	0	5.000.000	0	0
7	01	03	01	06	Administrasi Umum							
7	01	03	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.861.700	5.861.700	100	4.067.600	4.067.600	100
7	01	03	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.837.814	47.675.300	51,70	37.739.000	18.869.500	50,00
7	01	03	01	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	6.227.500	6.226.600	99,99	2.155.200	2.155.200	100
7	01	03	01	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.000.820	19.763.700	66,69	10.229.700	5.114.850	50,00
7	01	03	01	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	14.767.200	10.576.800	58,33	9.763.200	4.881.600	50,00
7	01	03	01	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	32.400.000	24.000.000	74,07	25.260.000	12.630.000	50,00
7	01	03	01	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.770.000	44.760.000	80,25	37.560.000	18.780.000	50,00
7	01	03	01	10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7	01	03	01	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	73.654.300	73.654.300	100	59.718.000	59.467.000	100
7	01	03	01	03	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	32.497.500	-	0	24.175.100	24.175.100	100
7	01	03	01	04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.964.000	-	0	200.000.000	199.461.000	100
7	01	03	01	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7	01	03	01	06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	6.000.000	100	6.000.000	3.000.000	50,00
7	01	03	01	07	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	5.680.000	5.680.000	100	8.520.000	5.680.000	66,67
7	01	03	01	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	disesuaikan dengan kedalaman RKA diawali dengan jumlah	20.282.400	20.282.400	100	16.743.300	9.026.000	53,91
7	01	03	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

7	01	03	01	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	19.791.200	19.468.400	98,37	9.067.000	6.135.000	67,66
7	01	03	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi/dipelihara				37.500.000	26.020.000	69,39
7	01	03	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
7	01	03	02		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7	01	03	02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (d disesuaikan dengan kedalaman RKA)	78.478.800	78.478.800	100	112.809.700	30.521.000	27,06
7	01	03	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7	01	03	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	78.478.800	78.478.800	100	36.300.000	20.666.700	56,93
7	01	03	02	04	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Jenis Kegiatan Pelayanan	39.206.700	39.206.700-	100	-	-	0
7	01	03	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan							
7	01	03	03	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7	01	03	03	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring dan petugas Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	6.300.000	6.300.000	100	6.299.800	6.299.800	100
7	01	03	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat							
7	01	03	03	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				30.000.000	21.900.000	75,00
7	01	03	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
7	01	03	04		Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
7	01	03	04	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec	Jumlah Jumlah Kordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	47.355.600	47.355.600	100	52.294.200	33.094.200	63,28
7	01	03	04	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	-	-		50.000.000	-	0
7	01	03	04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7	01	03	04	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan Patroli Dalam rangka Penegakan Perda/Perkada	9.813.900	9.813.900	100	7.383.900	6.183.900	83,75
7	01	03	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
7	01	03	05		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah							

7	01	03	05	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBN	25.162.000	25.162.000	100	15.000.000	-	0
7	01	03	05		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Kecamatan	200.000.000	200.000.000	100	159.356.000	65.600.000	41,17
7	01	03	06		Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa							
7	01	03	06		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7	01	03	06	01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.078.900	30.078.900	100	30.078.000	4.435.000	100
7	01	03	06	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa				19.574.300	19.574.300	100
7	01	03	06	02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan kelembagaan Tk Kecamatan	12.612.300	12.612.300	100	10.000.000	10.000.000	100
7	01	03	06	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	16.323.000	16.323.000	100	12.630.000	12.630.000	100
JUMLAH							2.434.937.734	2.335.729.392	95,93	1.470.333.217	3.378.946.907	55,83

Sumber: LRA Tahun 2022, 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.683.513.242,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.456.582.215,00 atau mencapai 54,28%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 Triwulan II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.171.865.342	1.230.112.715	56,64
5.01.01.2.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.794.700	2.906.400	15,46
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.795.100	2.906.400	50,15
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.249.900	0	0,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.249.900	0	0,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.249.900	0	0,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.249.900	0	0,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.648.160.342	816.331.265	49,52
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.644.699.542	812.870.465	49,42
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.460.800	3.460.800	100,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.152.200	7.152.200	58,85

3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.152.200	7.152.200	100,00
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	0	0,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.034.700	70.758.750	54,00
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.067.600	4.067.600	100,00
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.739.000	18.869.500	50,00
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.275.200	4.275.200	100,00
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.229.700	5.114.850	50,00
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.763.200	4.881.600	50,00
4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.260.000	12.630.000	50,00
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.560.000	18.780.000	50,00
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.140.000	2.140.000	100,00
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.893.100	272.903.100	100,00
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	
5.2	Pengadaan Mebel	24.175.100	24.175.100	100,00
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.718.000	49.267.000	100,00
5.4	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.461.000	100,00
5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.263.300	17.706.000	56,69

6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	3.000.000	50,00
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	5.680.000	66,67
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.743.300	9.026.000	53,91
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	46.567.000	26.020.000	55,87
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.067.000	6.135.000	67,66
7.2	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.500.000	26.020.000	69,39
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.109.700	51.187.700	34,33
1.	Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Vertikal Terkait	112.809.700	30.521.000	27,06
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	112.809.700	30.521.000	27,06
2.	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Yang Ada Di Kecamatan	36.300.000	20.666.700	56,93
2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	0	0	
2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.300.000	20.666.700	56,93

III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.299.800	28.199.800	77,69
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.299.800	6.299.800	100,00
1.1	Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara	0	0	
1.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	0	0	
1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.299.800	6.299.800	100,00
2.	Kegiatan Koordinasi PPKM Tingkat Desa	30.000.000	21.900.000	73,00
2.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	21.900.000	73,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.678.100	39.278.100	35,81
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Upaya Keamanan dan Ketertiban Umum	102.294.200	33.094.200	32,35
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52.294.200	33.094.200	63,28
1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	0	
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.383.900	6.183.900	83,75

2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.383.900	6.183.900	83,75
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	174.356.000	65.600.000	37,62
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	174.356.000	65.600.000	37,62
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000	0	
1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	159.356.000	65.600.000	41,17
1.3	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.204.300	42.203.900	100,00
1.	Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	42.204.300	42.204.300	100,00
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19.574.300	19.574.300	100,00
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	10.000.000	10.000.000	100,000
1.4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.630.000	12.629.600	100,00
	JUMLAH	2.171.865.342	1.230.112.715	56,64

Sumber : LRA Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 25 sub kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan sebagai berikut :

- 1) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga belum terserap seluruhnya.
- 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

Selain itu, terdapat sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1) Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Bayongbong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, 1 (satu) Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bayongbong sampai dengan triwulan II Tahun 2023, 5 (lima) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 3) Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bayongbong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, ada 12 (dua belas) Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut:
 - (1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dari total anggaran sebesar Rp. 3.460.800,- realisasi sebesar Rp. 3.460.800,- atau (100%)
 - (2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari total anggaran sebesar Rp. 7.152.200,- realisasi sebesar Rp. 7.152.200,- atau (100%)
 - (3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari total anggaran sebesar Rp. 4.067.600,- realisasi sebesar Rp. 4.067.600,- atau (100%)
 - (4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dari total anggaran sebesar Rp. 4.275.200,- realisasi sebesar Rp. 4.275.200,- atau (100%)

- (5) Penatausahaan Arsip Dinamis dari total anggaran sebesar Rp. 2.140.000,- realisasi sebesar Rp. 2.140.000,- atau (100%)
- (6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari total anggaran sebesar Rp. 59.718.000,- realisasi sebesar Rp. 59.467.000,- atau (100%)
- (7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari total anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp. 199.461.000,- atau (100%)
- (8) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dari total anggaran sebesar Rp. 6.299.800,- realisasi sebesar Rp. 6.299.800,- atau (100%)
- (9) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari total anggaran sebesar Rp. 19.574.300,- realisasi sebesar Rp. 19.574.300,- atau (100%)
- (10) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan dari total anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau (100%)
- (11) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dari total anggaran sebesar Rp. 12.630.000,- realisasi sebesar Rp. 12.629.600,- atau (100%).

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, di Kecamatan Bayongbong tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

3. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong adalah sebagai berikut:

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong

tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bayongbong pada umumnya.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bayongbong.

2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

c. Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan aktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong adalah sebagai berikut :

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bayongbong Pada umumnya.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bayongbong.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))				Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penerimaan Jawab (Bidang/Kasi)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp		K	Rp	K	%				
1	2	3	4	5		6		7				8		9		10	11	12		13= 6+12		14=13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	3.176.421.362		1.863.896.192	100%	2.169.725.342	444.011.947	759.785.068				1.203.797.015		3.067.693.207				61.353.864.140		Kec. Bayongbong	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	27.100.000		16.188.400		18.794.700	2.906.400	0				2.906.400		19.094.800				381.896.000			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	8.400.000		16.188.400		5.795.100	0	0				0		0				381.896.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	3.575.000		0		3.249.900	0	0				0		0				0			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	8 Dokumen	3.575.000		0		3.249.900	0	0				0		0				0			

		SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	3.575.000			3.249.900	0	0			0		0		0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	3.575.000			3.249.900	0	0			0		0		0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.050.929.162		1.563.758.592	1.648.160.342	296.117.572	520.212.893			816.330.465		11.661.863.786		47.601.781.140
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	2.045.477.662		1.556.773.592	1.644.699.542	296.117.572	516.752.893			812.870.465		11.612.435.214		47.392.881.140
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	5.451.500		6.985.000	3.460.800	0	3.460.000			3.460.000		49.428.571		208.900.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	12 Bulan	19.900.000		6.502.000	12.152.200	7.152.200	0			7.152.200		102.174.286		273.084.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	22 stel	9.900.000		6.502.000	7.152.200	7.152.200	0			7.152.200		102.174.286		273.084.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang	2 orang	10.000.000		0	5.000.000	0	0			0		0		0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	12 Bulan	169.521.160		158.864.100	128.894.700	38.304.375	30.314.575			68.618.950		980.270.714		4.549.661.000

			Daerah															
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 Paket	7.100.280		5.861.700	4.067.600	0			4.067.600		58.108.571			198.586.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	42.560.000		47.675.300	37.739.000	9.434.750	9.434.750		18.869.500		269.564.286			1.330.896.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	11.305.250		6.226.600	4.275.200	4.275.200	0		4.275.200		61.074.286			210.036.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan Jumlah Penggandaan	12 Paket	16.485.150		19.763.700	10.229.700	2.381.025	2.733.825		5.114.850		73.069.286			497.571.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Dokumen	11.634.480		10.576.800	9.763.200	2.440.800	2.441.000		4.881.800		69.740.000			309.172.000	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	29.700.000		24.000.000	25.260.000	6.315.000	6.315.000		12.630.000		180.428.571			732.600.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Laporan	45.236.000		44.760.000	37.560.000	9.390.000	9.390.000		18.780.000		268.285.714			1.270.800.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.500.000		0	2.140.000	2.140.000	0		2.140.000		0			42.800.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	833.310.000		73.654.300	283.893.100	67.393.000	191.535.000		258.928.000					3.698.971.429	6.651.646.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair	6 unit	108.630.000		0	24.175.100	0	0		24.175.100		345.358.571			483.502.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	74.680.000		73.654.300	59.718.000	59.467.000	0		59.467.000		849.528.571			2.662.426.000	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Kantor	3 Unit	650.00 0.000		0	200.000. 000	7.926.000	191.535. 000		199.461.00 0	2.849.442. 857	3.989.22 0.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	50.840 .640		31.962.40 0	31.263. 300	9.344.000	8.362.00 0		17.706.00 0	252.942.8 57	993.368. 000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Air Kantor dan Rumah Dinas Jumlah Pembayaran Listrik Kantor dan Rumah Dinas	12 Lapo ran	9.771.0 00		6.000.000	6.000.00 0	1.500.000	1.500.00 0		3.000.000	42.857.143	180.000. 000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Lapo ran	20.759. 000		5.680.000	8.520.00 0	2.840.000	2.840.00 0		5.680.000	81.142.857	227.200. 000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pemberish Jumlah Petugas Kebersihan	12 Lapo ran	20.310. 640		20.282.40 0	16.743.3 00	5.004.000	4.022.00 0		9.026.000	128.942.85 7	586.168. 000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	24.820 .400		19.468.40 0	46.567. 000	22.794.200	9.360.30 0		32.155.00 0	459.357.1 43	1,032.46 8.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Jumlah Service Kendaraan Jumlah Suku Cadang Kendaraan	6 Unit	12.067. 000		19.468.40 0	9.067.00 0	3.349.400	2.785.60 0		6.135.000	87.642.857	512.068. 000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit	12.753. 400		0	0	0	0		0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi		0		0	37.500.0 00	19.445.000	6.575.00 0		26.020.000	371.714.28 6	520.400. 000

		Lainnya																
2	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	159.09 5.970				27.406.700	23.781.0 00				51.187.70 0			731.252.8 57	4.161.59 8.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	115.96 8.600				13.990.000	16.531.0 00				30.521.00 0			436.014.2 85	2.964.13 0.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Olahraga, Pembinaan PBB, dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	12 Kegiatan	115.96 8.600				13.990.000	16.531.0 00				30.521.000			436.014.28 5	2.964.13 0.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Bulan	43.127 .370				13.416.700	7.250.00 0				20.666.70 0			295.238.5 71	1.197.46 8.000
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Petugas Pelayanan Kecamatan		0				0	0				0			0	0
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wlayah Kecamatan	Junlah Penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	1 Laporan	43.127. 370				13.416.700	7.250.00 0				20.666.700			295.238.57 1	413.334. 000
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Masyarakat Desa	100%	46.930 .000				28.199.800	10.950.0 00				39.149.80 0			559.282.8 57	908.996. 000

		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Satpol PP Jumlah Pembinaan Linmas														
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	12 Kali	50.000.000			50.000.000	0	0			0			0	0
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	11.565.290			7.383.900	0	6.183.900			6.183.900			88.341.428	319.956.000
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara republic indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	12 Kali	11.565.290			7.383.900	0	6.183.900			6.183.900			88.341.428	319.956.000
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	231.500.000		225.162.000	174.356.000	26.240.000	39.360.000			65.600.000			937.142.857	5.815.240.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	231.500.000		225.162.000	174.356.000	26.240.000	39.360.000			65.600.000			937.142.857	5.815.240.000
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah Pelaksanaan	165 Orang	16.500.000		25.162.000	15.000.000	0	0			0			0	503.240.000

		Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Upacara Hari - Hari Besar															
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 Orang	15.000.000				0	0			65.600.000				0	0
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi	12 Kali	200.000.000		200.000.000		159.356.000	26.240.000	39.360.000		0		937.142.857		5.312.000.000	
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	41.500.300		59.014.200		42.204.300	28.946.100	13.257.800		42.203.900		602.912.857		2.024.362.000	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen RPTK Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	41.500.300		59.014.200		42.204.300	28.946.100	13.257.800		42.203.900		602.912.957		2.024.362.000	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	22.720.000		30.078.900		0	0			0		0		0	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		0		0		19.574.300	6.316.500	13.257.800		19.574.300		279.632.857		391.486.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (PKK)		0		12.612.300		10.000.000	10.000.000	0		10.000.000		142.857.142		452.246.000	

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen (RPTK)	20 Dokumen	18.780. 300				12.629.600	0				12.629.600				180.422.85 7	579.052. 000			
								16.323.00 0		12.630.0 00											
Rata-rata capaian kinerja (%)													2.950.475. 238							11.929.0 01.333	
Predikat Kinerja													ST							ST	ST
Faktor pendorong pencapaian kinerja :																					
Faktor penghambat																					
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																					
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																					

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan Seksi Kesejahteraan Masyarakat Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian *stunting*, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh.

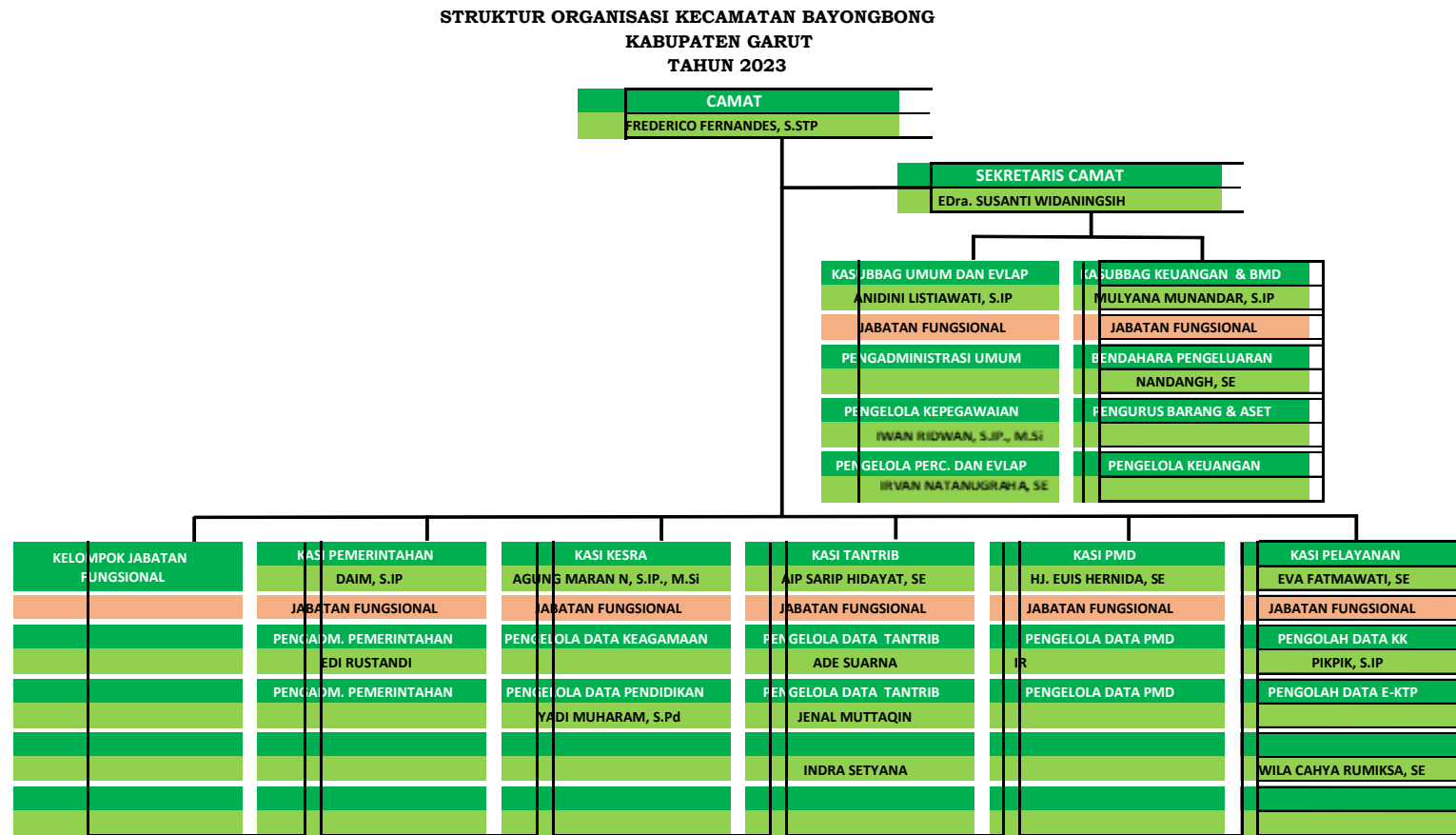
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Bayongbong sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bayongbong Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bayongbong berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Bayongbong

Gambar 2.1



Sumber: SOTK Kec. Bayongbong dan Perbup Garut No. 111 Tahun 2020

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
 - a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.
3. Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
- n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- o. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
- p. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- t. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- x. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- z. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja
- aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
- bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan Keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada
- ee. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan;
- hh. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf;
 - ii. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
- ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan;

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra RKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 s.d TW.II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,18	81,18	85	85,05	85,10	85	85,10	86	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	-	84	85	90	-	90	90	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	-	100	100	100	-	100	100	
4	Predikat SAKIP			C	C	C	B	BB	C	B	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan/SKPD, 2023

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa.
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik.
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa.
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.

8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang AKI/AKB.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Bayongbong disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayongbong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 2 bidang urusan yaitu bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 4 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 37 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.683.513.242,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.683.513.242,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 2.784.361.085,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 100.847.843,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp.2.683.513.242,00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.2.683.513.242,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.9

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 Kecamatan Bayongbong

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bayongbong

Lembar.....dari.....

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.207.066.885	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.171.865.342	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	18.794.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	18.794.700	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	5.795.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	5.795.100	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100%	3.249.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100%	3.249.900	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	3.249.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	3.249.900	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	100 %	3.249.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	100 %	3.249.900	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	3.249.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	3.249.900	

3.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.683.361.885	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.648.160.342	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.679.901.085	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.644.699.542	
4.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	3.460.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	3.460.800	
4.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	12.152.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	12.152.200	
4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	7.152.200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	7.152.200	
4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	5.000.000	
4.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	131.034.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	131.034.700	
4.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	4.067.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	4.067.600	
4.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	37.739.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	37.739.000	
4.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100%	2.155.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100%	2.155.200	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	10.229.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	10.229.700	
5.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100 %	9.763.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100 %	9.763.200	
5.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100%	25.260.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100%	25.260.000	

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	37.560.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	37.560.000	
6.1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	2.140.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	2.140.000	
6.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	283.893.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	283.893.100	
7	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	100 %	24.175.100	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	100 %	24.175.100	
7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	100 %	59.718.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	100 %	59.718.000	
7.2	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100 %	200.000.000	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100 %	200.000.000	
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	31.263.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	31.263.300	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayongbong	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100 %	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayongbong	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100 %	6.000.000	
1.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	8.520.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	8.520.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	16.743.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	16.743.300	

2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	46.567.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	46.567.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100%	9.067.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100%	9.067.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100 %	37.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100 %	37.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bayongbong	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	167.080.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bayongbong	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	149.109.700	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	128.080.300	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	112.809.700	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	128.080.300	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	112.809.700	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	39.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	36.300.000	

IV	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	100 %	39.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	100 %	36.300.000	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bayongbo ng	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	36.299.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bayongbo ng	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	36.299.800	
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	100 %	6.299.800	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	100 %	6.299.800	
1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	100 %	6.299.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	100 %	6.299.800	
V	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	0	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	30.000.000	
1.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	30.000.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	30.000.000	
1.2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bayongbo ng	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	113.914.100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bayongbo ng	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	109.678.100	
1.3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	103.400.200	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	102.294.200	
VI	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100 %	53.400.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100 %	52.294.200	

1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	100 %	50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	100 %	50.000.000	
1.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	10.513.900	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	7.383.900	
1.2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	100%	10.513.900	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	100%	7.383.900	
1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bayongbo ng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	215.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bayongbo ng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	174.356.000	
1.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	215.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bayongbo ng	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	174.356.000	
1.5	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Kecamatan Bayongbo ng	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	15.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Kecamatan Bayongbo ng	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	15.000.000	

	Negara Kesatuan Republik Indonesia					Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Bayongbong	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Bayongbong	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	0	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	100%	200.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	100%	159.356.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bayongbong	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	45.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bayongbong	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	42.204.300	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	45.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	42.204.300	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	20.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	19.574.300	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bayongbong	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bayongbong	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	10.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen RPTK	100%	15.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen RPTK	100%	15.000.000	
JUMLAH					2.784.361.085						2.683.512.292

Tabel 2. 10

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Target 2023		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Semula	Menjadi	RKPDP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
									APBD 2023	RKPDP 2023 Perubahan			Nasional					Daerah					
7	UNSUR KEWILAYAHAN		500	100	100	100	100	2.207.066.885	2.784.361.085	2.683.513.242	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100	2.837.361.085	Kecamatan Bayongbong						
7	01	KECAMATAN	500	100	100	100	100		2.207.066.085	2.171.865.342	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100	2.837.361.085	Kecamatan Bayongbong						
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	100	100	100	2.207.066.885	2.207.066.885	2.171.865.342	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100	2.268.046.785	Kecamatan Bayongbong					
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	12	12	12	12	12	18.794.700	18.794.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 dokumen	5.795.100	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	1	1	1	1	5.795.100	5.795.100	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 dokumen	3.249.900	Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	1	1		3.249.900	3.249.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 dokumen	3.249.900	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	0	0	1	1		3.249.900	3.249.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 dokumen	3.249.900	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	0	0	1	1		3.249.900	3.249.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 dokumen	3.249.900	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	0	1	1		3.249.900	3.249.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	0	1	1		0	0	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	2	2	2	2		0	0	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	12		1.683.361.885	1.648.160.342	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.683.361.885		Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	12		1.679.901.085	1.644.699.542	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 orang/bulan	1.679.901.085			Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	1	1	1	1		3.460.800	3.460.800	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 laporan	3.460.800			Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	12	12	12	12		12.152.200	12.152.200	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.152.200		Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	85	17	17	17	17		7.152.200	7.152.200	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22 paket	7.152.200			Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	3	3	3	3		5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 orang	5.000.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	12		131.034.700	131.034.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					132.009.700	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	10	10	10	10		4.067.600	4.067.600	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	4.067.600	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	41	41	41	41		37.739.000	37.739.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	37.739.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	16	16	16	16		4.275.200	4.275.200	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	4.275.200	Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	12	12	12	12		10.229.700	10.229.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 paket	11.204.700	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	72	72	72	72		9.763.200	9.763.200	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 dokumen	9.763.200	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	1364	1364	1364	1364		25.260.000	25.260.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	25.260.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	600	600	600	600		37.560.000	37.560.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	37.560.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	1	1	1	1		2.140.000	2.140.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 dokumen	2.140.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	12	12	12	12		283.893.100	283.893.100	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					381.398.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	1	1	1	1		0	0	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	5	5	0	0		24.175.100	24.175.100	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	46.680.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	60	12	12	12	12		59.718.000	59.718.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 unit	59.718.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	0	0	2	2		200.000.000	200.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	275.000.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	12		31.263.300	31.263.300	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31.263.300	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	12	12	12	12		6.000.000	6.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	6.000.000	Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	3	3	3	3		8.520.000	8.520.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan	8.520.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	12	12	12	12		16.743.300	16.743.300	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan	16.743.300	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	12		46.567.000	46.567.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9.067.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	8	8	8	8		9.067.000	9.067.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 unit	9.067.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	0	0	0	0		37.500.000	37.500.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Kecamatan Bayongbong
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	100	100	100	100		167.080.300	149.109.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				191.100.800	Kecamatan Bayongbong
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	12		128.080.300	112.809.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				152.100.800	Kecamatan Bayongbong

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	100	100	100	100		36.299.800	36.299.800	Kab. Garut, Bayongb ong, Semua Keluraha n	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m					9.299.600	Kecamatan Bayongbon g
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	60	12	12	12	12		6.299.800	6.299.800	Kab. Garut, Bayongb ong, Semua Keluraha n	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umum					6.299.800	Kecamatan Bayongbon g
7	01	03	2,01	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	1	1	1	1		6.299.800	6.299.800	Kab. Garut, Bayongb ong, Semua Keluraha n	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umum						Kecamatan Bayongbon g
7	01	03	2,01	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	4	4	4	4		0	0	Kab. Garut, Bayongb ong, Semua Keluraha n	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umum			7 lemba ga	6.299.800	Kecamatan Bayongbon g	
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	12	12	12	12		30.000.000	30.000.000	Kab. Garut, Bayongb ong, Semua Keluraha n	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umum					2.999.800	Kecamatan Bayongbon g
7	01	03	2,05	0 2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	1	1	1	1		30.000.000	30.000.000	Kab. Garut, Bayongb ong, Semua Keluraha n	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m			1 doku men	2.999.800	Kecamatan Bayongbon g	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	100	100	100	100		113.914.100	109.678.100	Kab. Garut, Bayongb ong, Semua Keluraha n	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m					63.913.900	Kecamatan Bayongbon g
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	60	12	12	12	12		103.400.200	102.294.200	Kab. Garut, Bayongb	Dana Trans fer Umu m-					53.400.000	Kecamatan Bayongbon g

					Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum									ong, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum							
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	4	4	4	4		53.400.200	52.294.200	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	53.400.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	1		50.000.000	50.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Kecamatan Bayongbong

7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	1	1	1	1		10.513.900	7.383.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.513.900	Kecamatan Bayongbong
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	12	12	12	12		10.513.900	7.383.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	10.513.900	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	100	100		215.000.000	174.356.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			225.000.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	12	12	12	12		215.000.000	174.356.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			225.000.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	1	1	1	1		15.000.000	15.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		165 orang	25.000.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	jumlah pelaksanaan sosialisasi/ bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	2	2	2	2		0	0	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				Kecamatan Bayongbong	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Bayongbong tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Bayongbong yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;

2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan

daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1	:	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
PPD 2	:	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
PPD 3	:	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
PPD 4	:	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
PPD 5	:	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
PPD 6	:	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
PPD 7	:	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
PPD 8	:	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan Kecamatan Bayongbong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 yaitu Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Kabupaten Garut, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator tujuan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tabel 3.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Yang Mengacu Kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	81,5	84	86,16	86,20
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	65	82	82	84

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Bayongbong Tahun 2019-2024

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SKM
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan.

Berikut disajikan Rencana Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Yang Mengacu Kepada Perubahan
Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	N/A	-	70	75	80
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	85	90	95	100

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	B	B	BB
---	--	-----------------------	----------	----	----	---	---	----

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Bayongbong Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu unsur kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Perio de RPJ MD	Realis asi Capai an RKP D Tahu n 202 1	Prakira an Capaia n Target RKP D Tahu n 2022	Target 2023		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangka t Daerah Penangg ung Jawa b				
						Semu la	Menja di	RKP D 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif					
									APBD 2023	RKP D 2023 Perubahan			Nasional					Daera h			
7	UNSUR KEWILAYAHAN		500	100	100	100	100	2.207.066.885	2.784.361.085	2.683.513.242	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.837.361.085	Kecamatan Bayongbong				
7	01	KECAMATAN	500	100	100	100	100		2.207.066.085	2.171.865.342	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.837.361.085	Kecamatan Bayongbong				
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	100	100	100	100	2.207.066.885	2.207.066.885	2.171.865.342	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.268.046.785	Kecamatan Bayongbong			
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	12	12	12	18.794.700	18.794.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 dokumen	5.795.100	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	1	1	5.795.100	5.795.100	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			4 dokumen	3.249.900	Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	12	12	12	12		10.229.700	10.229.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 paket	11.204.700	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	72	72	72	72		9.763.200	9.763.200	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 dokumen	9.763.200	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	1364	1364	1364	1364		25.260.000	25.260.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	25.260.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	600	600	600	600		37.560.000	37.560.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	37.560.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	1	1	1	1		2.140.000	2.140.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 dokumen	2.140.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	12	12	12	12		283.893.100	283.893.100	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					381.398.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	1	1	1	1		0	0	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	5	5	0	0		24.175.100	24.175.100	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	46.680.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	60	12	12	12	12		59.718.000	59.718.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 unit	59.718.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	0	0	2	2		200.000.000	200.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	275.000.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	12		31.263.300	31.263.300	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31.263.300	Kecamatan Bayongbong
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	12	12	12	12		6.000.000	6.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	6.000.000	Kecamatan Bayongbong

7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	3	3	3	3		8.520.000	8.520.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	8.520.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	12	12	12	12		16.743.300	16.743.300	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	16.743.300	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	12		46.567.000	46.567.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.067.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	8	8	8	8		9.067.000	9.067.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 unit	9.067.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	0	0	0	0		37.500.000	37.500.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Kecamatan Bayongbong	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	100	100	100	100		167.080.300	149.109.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						191.100.800	Kecamatan Bayongbong
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	60	12	12	12	12		128.080.300	112.809.700	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						152.100.800	Kecamatan Bayongbong

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	100	100	100	100		36.299.800	36.299.800	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.299.600	Kecamatan Bayongbong
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	60	12	12	12	12		6.299.800	6.299.800	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.299.800	Kecamatan Bayongbong
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	1	1	1	1		6.299.800	6.299.800	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Kecamatan Bayongbong
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	4	4	4	4		0	0	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 lembaga	6.299.800	Kecamatan Bayongbong	
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	12	12	12	12		30.000.000	30.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.999.800	Kecamatan Bayongbong
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	1	1	1	1		30.000.000	30.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 dokumen	2.999.800	Kecamatan Bayongbong	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	100	100	100	100		113.914.100	109.678.100	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					63.913.900	Kecamatan Bayongbong

7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	12	12	12	12		103.400.200	102.294.200	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53.400.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	4	4	4	4		53.400.200	52.294.200	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan	53.400.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	1		50.000.000	50.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Kecamatan Bayongbong

7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	1	1	1	1		10.513.900	7.383.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.513.900	Kecamatan Bayongbong
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	12	12	12	12		10.513.900	7.383.900	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	10.513.900	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	100	100		215.000.000	174.356.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			225.000.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	12	12	12	12		215.000.000	174.356.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			225.000.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	1	1	1	1		15.000.000	15.000.000	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		165 orang	25.000.000	Kecamatan Bayongbong	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan	6	2	2	2	2		0	0	Kab. Garut, Bayongbong,	Dana Transfer Umum-Dana					Kecamatan Bayongbong

Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Bayongbong

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Bayongbong

Kode	Bidang	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Tolok Ukur	Target	
7			UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01		KECAMATAN																		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	5.795.100	5.795.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.795.100
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	3.249.900	3.249.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.249.900
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	3.249.900	3.249.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.249.900

7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	3.249.900	3.249.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.249.900
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	3.249.900	3.249.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	3.249.900

						Tingkat Kecamatan	Kantor yang Disediakan													Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		3 Jenis		12 Bulan		37.739.000	37.739.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	37.739.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		1 Paket		12 Bulan		4.275.200	4.275.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.275.200
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		2 jenis		12 Bulan		10.229.700	10.229.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.204.700
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		12 Dokumen		12 Bulan		9.763.200	9.763.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.763.200
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		11 Bulan		12 Bulan		25.260.000	25.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	100 %	25.260.000

						Daerah di Tingkat Kecamatan											m		Daerah di Tingkat Kecamatan			
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		12 Laporan		12 Bulan		37.560.000	37.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	37.560.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %		1 Dokumen		12 Bulan		2.140.000	2.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.140.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		2 Unit		12 Bulan		24.175.100	24.175.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	46.680.000

						Tingkat Kecamatan		Pemerintah Daerah											Tingkat Kecamatan				
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		4 Jenis		12 Bulan		59.718.000	59.718.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	59.718.000	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %		1 Gedung		12 Bulan		200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	275.000.000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		12 Laporan		12 Bulan		6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6.000.000	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		1 Tahun		12 Bulan		8.520.000	8.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.520.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		12 Laporan		12 Bulan		16.743.300	16.743.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100 %	16.743.300	

						Kecamatan														Kecamatan													
7	01	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		1 Tahun		12 Bulan		9.067.000	9.067.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.067.000											
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		2 Unit		12 Bulan		37.500.000	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0											
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																											
7	01	02	2,01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																											
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		8 Dokumen		12 Bulan		128.080.300	112.809.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	100 %	152.100.800											

7	01	04	2,02	01	Koordinasi/ Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentas e Penanga nan Ganggua n Trantibu m	Jumlah Laporan Koordinasi /Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republi k Indo nesia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Bayongbo ng, Semua Kelurahan	100 %		12 Laporan		12 Bulan		10.513.900	7.383.900	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		Persentas e Penanga nan Ganggua n Trantibu m	100 %	10.513.900
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertaha nan dan Pemelihara an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	ersentase Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Umum yang dilimpahka n Kepada Camat Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Umum yang dilimpahka n Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantap kan Pengamala n Pancasila, Pelaksanaa n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertaha nan dan Pemelihara an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Bayongbo ng, Semua Kelurahan	100 %		100 Orang		12 Bulan		15.000.000	15.000.000	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m		ersentase Penyeleng ga raan Urusan Pemerinta han Umum yang dilimpah kan Kepada Camat Persentas e Penyeleng ga raan Urusan Pemerinta han Umum yang dilimpah kan Kepada Camat	100 %	225.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksana an Tugas Forum Koordinasi	ersentase Penyelengga raan Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha	Kab. Garut, Bayongbo ng,	100 % 100 %		12 Dokumen		12 Bulan		200.000.000	159.356.000	Dana Transf er Umu m-		ersentase Penyeleng ga raan Urusan Pemerinta	100 % 100 %	200.000.000

					Pimpinan di Kecamatan	an Umum yang dilimpahkan	i Pimpinan di Kecamatan	n Umum Yang	Semua Kelurahan									Dana Alokasi Umum		han Umum yang			
					Kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		Dilimpahkan Kepada Camat															
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																		
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen		12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %		
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka fasilitasi pemilihan kepala desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen		12 Bulan			20.000.000	19.574.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %		
7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan							0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	50.000.000	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen		12 Bulan			10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	15.000.000	

							Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pemerintahan Desa									m														
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan	100 %		1 Dokumen	12 Bulan		15.000.000	12.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	15.000.000										
TOTAL																							2.784.361.085	2.683.512.292							2.837.361.085

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan lunjukan dan pergeseran anggaran SKPD

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN